

September 2022

Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009

M. Faishal Aminuddin
University of Brawijaya, mfaishal@ub.ac.id

Moh. Fajar Shodiq Ramadhan
University of Brawijaya

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Other Political Science Commons](#), and the [Political Theory Commons](#)

Recommended Citation

Aminuddin, M. Faishal and Ramadhan, Moh. Fajar Shodiq (2022) "Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009," *Jurnal Politik*: Vol. 1: Iss. 1, Article 2.

DOI: 10.7454/jp.v1i1.9

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol1/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009

M. FAISHAL AMINUDDIN*

MOH. FAJAR SHODIQ RAMADLAN**

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang
FISIP Gedung Darsono Lantai 2, Jl. Veteran, Malang, 65145
Indonesia
Email: mfaishal@ub.ac.id

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia memiliki keunikan dalam hal pembangunan partai politiknya. Setelah Pemilu 2009, spesies partai politik baru yang sebelumnya tidak terwakili dan muncul di demokrasi Barat, kemudian berkembang. Artikel ini menginvestigasi korelasi antara pragmatisme politik dengan perubahan partai politik yang adaptif dalam pemilu maupun dalam parlemen pasca Pemilu. Sebuah temuan penting dari studi ini adalah kemunculan spesies match-all party yang hadir dalam kondisi politik pragmatis. Terbukti bahwa demokratisasi di negara berkembang mengalami perjalanan yang dinamis. Untuk memperkuat temuan-temuan ini, sebuah analisis dinamika partai politik juga dihadirkan. Bagaimana partai politik mempertahankan citra mereka di depan publik dan pada saat yang sama membentuk pola interaksi mereka di pemerintahan dan parlemen.

Kata kunci: pragmatisme, partai politik, organisasi kepartaian

ABSTRACT

Indonesia's democratization resulted in a uniqueness in party development. After the 2009 elections, new political party species which previously not represented and appears in western democracies, was raised. This article investigates the correlation between political pragmatism with adaptive party change in the electoral contest as well as in the parliament following the election. An important finding of this study is the emergence of species of match-all party that exist in pragmatic political conditions. It is proved that democratization in developing countries has a dynamic route. In strengthening these findings, an analysis of the dynamics of political parties also delivered. How parties maintaining their image in front of the public and at the same time shaping their patterns of interaction in government and parliament.

Keywords: pragmatism, political party, party organization

PENDAHULUAN

Pemilihan umum 2009 dihelat dalam kondisi politik yang stabil dengan iklim yang kondusif. Tidak ada kendala berarti selama pemilu dalam

* Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang.

** Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Malang.

pengertian peningkatan konflik antar partai politik. Jumlah kontestan dalam pemilu legislatif sebanyak 38 partai nasional dan jumlah itu ditambah pula 6 partai lokal di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dari banyak parpol yang lahir, ideologi yang diwakili tidak terlalu bervariasi. Selain itu, suara parpol berbasis Islam mengalami penurunan. Dalam pemilu itu terdapat kecenderungan redupnya pengaruh patron-klientisme dikarenakan suara elite tidak berbanding lurus dengan suara pemilih, seperti yang tampak pada perolehan suara Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang merupakan sempalan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Juga banyak partai politik berbasis nasionalis sebagai sempalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan parpol berideologi pembangunan seperti Partai Golongan Karya (Golkar).

Masuknya partai politik baru yang tidak memiliki basis massa dan tak terkait dengan banyak organisasi yang ada, kemudian memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengindikasikan bahwa politik aliran, yang dipercaya sebagai basis politik dari konstelasi partai politik di Indonesia, telah mengalami kemunduran. Kemunduran juga dialami oleh partai berbasis ideologi keagamaan dan sentimen primordial. Hal yang sama juga terjadi di partai politik tengah-kiri yang berbasis pada nasionalisme, sosialisme dan kerakyatan. Tentu hal ini sangat penting untuk dilihat dalam konstelasi politik Indonesia di mana arah demokratisasinya ditentukan dari polarisasi lembaga-lembaga politiknya.

Di samping mudahnya ideologi dalam konstelasi politik pasca reformasi, partai politik juga terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis dan transaksional, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Semua partai dalam pemilu akhirnya cenderung ke “tengah” atau lebih moderat, dan berebut ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Fenomena ini akhirnya juga mendorong partai politik berebut suara dengan menawarkan pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek dalam kampanye pemilu. Pada momen politik di antara dua pemilu, pragmatisme partai politik dapat diamati dari pola koalisi dan perubahan dalam koalisi. Kecenderungan pragmatis partai

politik ini akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, dan menjadi pengantar dari argumentasi kecenderungan partai politik pasca pemilu 2009 yang memapankan model *match all-party*.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan, apakah pemilu 2009 menjadi tonggak awal munculnya spesies baru partai politik? Sejauh mana kontribusi pragmatisme politik terhadap spesies partai baru tersebut? Bagaimana prediksi masa depan partai-partai politik setelah diuji melalui faktor citra partai di depan publik dan konstelasi koalisi di DPR?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini akan membahas tiga hal: Pertama, artikel ini akan membahas konseptualisasi *match-all party* sebagai spesies partai baru dalam tipologi partai elektoralis. Kedua, artikel ini juga melihat adanya pragmatisme politik sebagai faktor pembentuk *match-all party*. Ketiga, akan dibahas pula analisis tentang kompatibilitas partai dalam dinamika perubahan institusional baik dalam kontestasi partai dalam memperebutkan simpati publik atau formasi koalisi di DPR.

Rekomendasi penting yang diharapkan dari tulisan ini adalah perbaikan *positioning* partai dalam memberikan kontribusi optimal bagi efektivitas jumlah dan kinerja parpol di parlemen. Selain itu, analisis yang akan disampaikan berguna dalam membuat pemetaan koalisi politik di parlemen dan pemerintah terpilih.

CELAH DAN PELUANG PENGEMBANGAN DALAM TIPOLOGI PARTAI POLITIK

Banyak sarjana ilmu politik yang telah memformulasikan tipologi partai politik (Duverger 1954; Kitschelt 1989; Wolinetz, 2002, Gunther dan Diamond, 2001). Kami menggunakan klasifikasi yang dikembangkan Gunther dan Diamond, yakni pada tipologi partai elektoralis, dalam melihat perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi. Tipologi ini dapat digunakan untuk melihat kutub atau posisi partai dan gerak partai baik dalam pemilu maupun kecenderungannya di antara dua pemilu. Gunther dan Diamond (2003, 168) sendiri menyebutkan bahwa model tipologi partai politik belum cukup mumpuni dalam menangkap berbagai variasi jenis partai politik di dunia. Hal ini berarti

masih terdapat celah dan peluang untuk memberikan varian partai baru, termasuk dalam tipologi kepartaian yang sudah ada. Beberapa argumen Gunther dan Diamond (2003) terkait hal tersebut didasari pada beberapa alasan. Pertama, hampir semua tipologi partai politik berasal dari studi-studi partai politik di Eropa Barat, setidaknya selama satu hingga setengah abad terakhir. Sedangkan perkembangan partai politik di berbagai negara, yang tak dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu tertentu, dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan teknologi (misal televisi, yang belum ada pada saat tipologi partai dibuat), keragaman etnis, agama dan bahasa. Di negara-negara demokrasi baru, penting pula diperhatikan perubahan pada budaya massa dan stuktur sosial di akhir abad kedua puluh, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pembilahan kelas, dan konflik-konflik sosial politik yang mempengaruhi budaya politik partisan. Dinamika politik dalam beberapa dekade terakhir pada dasarnya membuka peluang perluasan model kepartaian.

Kedua, pada tipologi yang sudah ada, Gunther dan Diamond menilai walaupun terdapat berbagai kriteria, namun masih terdapat kekurangan dalam menciptakan tipologi yang konsisten dan kompatibel antara tipe atau model yang satu dengan yang lain. Beberapa tipologi mendasarkan pada kriteria yang bersifat fungsional, mengklasifikasikan partai berdasarkan tujuan kehadirannya dengan tujuan tertentu yang dikejar. Beberapa tipologi yang lain mendasarkan pada besar atau kecilnya struktur partai dengan infrastruktur dan jaringan yang kompleks dan relasi dengan organisasi-organisasi sosial. Beberapa sarjana politik lain, secara implisit maupun eksplisit, mendasarkan klasifikasi mereka pada gagasan orientasi sosial, bahwa partai politik adalah produk (dan mewakili kepentingan tertentu) dari berbagai kelompok sosial. Tipologi-tipologi tersebut lebih banyak hanya didasarkan pada pemilihan satu kriteria sebagai dasar tipologi, baik pada struktur organisasi, tujuan organisasi pokok atau basis sosial representasi. Hal ini menurut Gunther dan Diamond, mempersempit fokus analisis, sementara banyak variasi dalam setiap jenis partai politik tidak dianalisis secara sistematis. Inkonsistensi tersebut, serta kurangnya presisi dalam menentukan partai politik jenis tertentu, juga membuka peluang melahirkan tipologi partai politik baru.

Tawaran spesies baru pada tipologi partai elektoralis merupakan upaya untuk membangun tipologi partai politik di Indonesia yang lebih memadai. Upaya menawarkan tipologi partai politik diperlukan untuk memberi kerangka teoretis dan konseptual yang lebih mencerminkan varian partai, terutama di luar Eropa Barat di mana banyak tipologi kepartaian diciptakan. Dengan demikian jumlah jenis-jenis partai politik dapat ditingkatkan. Selain itu studi mengenai spesies ini juga berarti membangun model dan terminologi baru, atau memunculkan spesies partai baru, yang belum dikemukakan atau dikembangkan oleh sarjana ilmu politik sebelumnya, serta menjadi bagian untuk menciptakan keteraturan pada beberapa kriteria yang paling umum digunakan sebagai dasar membangun tipologi partai. Sementara secara khusus, penulis menghindari upaya mengenalkan varian partai baru dalam tipologi yang sudah ada, dengan hanya didasarkan pada kesimpulan terhadap kasus-kasus tertentu yang tak mampu secara memadai digunakan untuk menganalisis tipologi partai politik. Oleh karena itu, kami melihat kecenderungan sikap politik partai politik baik pada pemilu maupun di antara dua pemilu sejak tahun 2009 dapat menjadi dasar untuk membangun analisis terhadap pengembangan variasi spesies partai baru.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan analisis deskriptif sehingga akan memberikan kontribusi yang bersifat konseptual terhadap penyebab pergeseran dan bentuk konstelasi parpol di Indonesia. Secara umum tawaran konseptualisasi ini dapat menjadi salah satu alat untuk memahami orientasi dan perilaku partai di negara demokrasi baru.

MUNCULNYA *MATCH-ALL PARTY* DAN KATEGORISASI PARTAI ELEKTORALIS SEBELUMNYA

Memahami spesies partai politik memberikan keuntungan terutama berkaitan dengan posisi partai politik. Landasan teoretik mengenai spesies partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Gunther & Diamond

(2001), memungkinkan untuk menemukan tipologi baru partai politik yang sebelumnya tidak terwakili oleh tipologi lama. Pemilu menjadi arena paling utama dalam kontestasi politik yang menentukan tumbuh kembangnya partai politik. Hal ini mempengaruhi pergerakan orientasi partai politik sehingga tampak aktivitas partai politik hanya terjadi pada masa-masa menjelang pemilu saja. Partai dengan aktivitas untuk menjadikan pemilu sebagai satu-satunya sasaran penting terwakili oleh tipe partai elektoralis (*electoralist party*). Dalam rumpun partai elektoralis, terdapat tiga tipe yakni partai *catch-all* dengan karakteristik utama ketidakjelasan ideologi dan platform dengan tingkat organisasi yang tidak terlalu mengakar. Kemudian, tipe *programmatic* yang menitikberatkan pada atraktivitas program-program yang dibawa oleh kandidatnya dan tipe *personalistic* yang bertumpu pada patronase yang kuat dengan adanya pemimpin yang kharismatik.

Secara umum, terdapat tiga aspek penting yang perlu dicermati dari situasi pasca pemilu 2009, yakni, pertama, model organisasi kepartaian yang tidak jelas bentuknya. Dalam perkembangannya, tak ada satu pun partai politik yang memiliki kecenderungan hanya pada salah satu kutub jenis parpol seperti klasifikasi Gunther dan Diamond. Partai-partai politik di Indonesia tampak menggabungkan ketiga unsur klasifikasi partai elektoral tersebut. Sementara itu beberapa partai politik di Indonesia cenderung berkembang di antara dua kutub (*catch-all personalistic* dan *catch-all programmatic*).

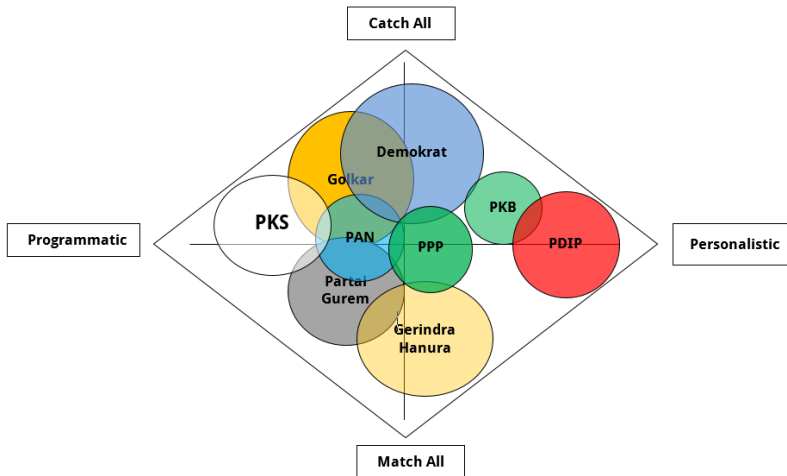
Kedua, formulasi kebijakan dibuat secara reaktif dan tidak merefleksikan pemahaman yang mendalam dan mempunyai landasan klaim konstituensi yang tegas. Dalam isu-isu publik yang mengemuka, partai mempunyai peluang besar sebagai pembentuk opini tandingan namun sifat reaktif yang terlalu dominan membuat pernyataan resmi partai menjadi lebih mudah berpindah haluan dalam waktu relatif cepat. Apalagi, beberapa faksi di dalam partai tidak mempunyai persamaan visi sehingga rentan terjadi silang pendapat internal yang berujung kepada perpecahan. Ketiga, posisi partai politik dalam implementasi kebijakan yang cenderung mengikuti kepentingan kekuatan politik dominan yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Memang terdapat bebera-

pa catatan mengenai sikap kritis partai politik melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Namun usaha tersebut pada akhirnya bisa dinegosiasikan tanpa ada penjelasan yang memadai kepada konstituennya dan publik secara umum. Di samping itu, kecenderungan pemilih yang semakin rasional dan pragmatis, serta situasi politik yang cenderung transaksional, menjadikan partai-partai politik memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki untuk memenangkan pemilu.

Situasi-situasi di atas menjadi beberapa aspek yang diperhatikan dalam mengidentifikasi tipe baru partai elektoralis. Dari tiga tipe partai turunan partai elektoralis, polarisasi kepartaian Indonesia mempunyai tipe baru, yakni *match-all party* yang bisa diidentifikasi sebagai kecenderungan partai untuk memadukan semua unsur pencapaiannya. Kehadiran spesies *match-all party*, yang di Indonesia cenderung terjadi pada partai-partai politik baru, bisa diidentifikasi dengan beberapa indikator: ketiadaan basis massa atau modal sosial yang kuat sebelumnya, ketergantungan terhadap eksistensi figur dan program, serta pemanfaatan berbagai potensi untuk memperoleh keuntungan baik pada dimensi citra maupun material. Partai yang masuk kategori *match-all* mempunyai ciri utama yang terletak pada tiadanya pembatasan ideologi, platform dan strategi untuk mengimplementasikan program-programnya. Definisi tegasnya adalah antonim dari partai *catch-all*.

Dari gambar 1 terlihat adanya polarisasi partai politik yang mengarah kepada model *catch-all*. Partai yang berada dalam kubu *catch-all personalistic* di antaranya adalah PDIP, PKB, dan Demokrat. PDIP tetap mengandalkan basis pemilih tradisional-nasionalis dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dalam pemilu 2009, perolehan suara PDIP merosot dari 18.5% pada pemilu 2004 menjadi 14.0%. Penurunan ini dapat dilihat pada basis massa PDI-P, yang cenderung bergeser ke partai politik yang dianggap lebih menguntungkan secara pragmatis. Penolakan PDI-P terhadap kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi perolehan suara mereka. Selain itu, jika melihat pada partai yang menyuarakan ekonomi kerakyatan melalui iklan politik mereka, Gerindra dan Hanura juga men-

jadi partai alternatif pemilih PDI-P yang menaruh perhatian pada isu ekonomi kerakyatan.



Gambar 1: Polarisasi Spesies Partai Politik Indonesia Pasca pemilu 2009

Persoalan yang sedikit berbeda dialami oleh PKB. Sebagai partai yang mempunyai basis dukungan dari Ormas NU mempunyai tantangan yang besar. Secara politik, figur Gus Dur yang mampu menempatkan PKB memperoleh 10.6% pada pemilu 2004 terlihat signifikan. Namun, pasca perseteruan internal antara kubu Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar yang memuncak dengan hasil mentalnya Gus Dur dari kepengurusan resmi yang diakui pemerintah, membuat suara PKB turun menjadi 5.0% dalam pemilu 2009. Pendukung PKB dari NU tidak begitu tertarik lagi untuk kembali ke PPP yang terbukti dengan penurunan suara PPP atau bergabung dengan partai sempalan PKB yakni PKNU yang didirikan mantan ketua DPW PKB Jawa Timur Choirul Anam bersama para kiai besar di Jawa Timur. Suara PKB sebelumnya lebih banyak masuk ke kantong Partai Demokrat.

Basis massa tradisional, baik yang terwadahi secara kultural atau institusional tetap membutuhkan figur. Prabowo Subianto melalui Gerindra mampu menggaet larinya pendukung non-ideologis PDIP dan menempatkan partainya dalam posisi papan tengah dengan per-

olehan 4.5%. Hal yang sama juga terjadi pada pendukung PKB yang berbondong-bondong pindah ke Partai Demokrat. Figur Yudhoyono dianggap mampu merepresentasikan kerinduan pada pemimpin yang bisa memberikan kepastian dan yang paling utama adalah mempunyai klaim legitimasi sebagai bagian dari kepentingan kelompok tradisional tersebut.

Partai yang berada dalam kubu *catch-all programmatic* diantaranya adalah Partai Golkar, PKS dan PAN. Golkar secara eksplisit menyatakan sebagai dirinya sebagai partai *catch-all*, sekaligus sebagai menjadikannya sebagai strategi mereka dalam pemilu (Tanjung 2007; Azwar 2009). Di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, Golkar tidak banyak memainkan peranan penting dalam merawat loyalitas di dalam lingkaran unsur pendukung politiknya. Suara Golkar banyak lari ke Partai Demokrat karena banyak simpul politik Golkar yang kurang diberi perhatian membawa basis dukungan politik untuk merapat pada Yudhoyono. Penurunan suara Golkar yang begitu drastis dari 21.6% menjadi 14.5% merupakan pukulan telak bagi partai yang mempunyai mekanisme kerja yang bereputasi baik ini. Era Golkar baru yang dicetuskan oleh mantan ketua umum Akbar Tanjung sebenarnya menjadi momentum bagi bersemayamnya orientasi politik institusional. Golkar harus menjadi partai yang mampu memberikan program konkret dan terlibat di dalam kekuasaan. Partai lainnya, PAN, tidak bisa mengandalkan basis dukungan ormas Muhammadiyah semata melainkan harus memperluas jangkauan pemilihnya terutama pada kelompok Islam menengah di pedesaan serta mengandalkan kandidat populer yang bahkan tak memiliki kedekatan dengan PAN sebelumnya untuk meraih dukungan (Tomsa and Ufen 2013, 33). Kepemimpinan Amien Rais masih membayangi PAN di samping banyaknya faksi-faksi yang ikut menentukan kebijakan internal partai.

Partai Islam yang berhasil beradaptasi dan mengikuti kontestasi secara berkelanjutan serta mendapatkan peluang untuk menggaet dukungan dari beberapa kelompok Islam adalah PKS. Partai ini menerapkan pola perluasan dukungan yang melintasi batas-batas ideologi, sejarah dan identifikasi sosial politik yang selama ini menjadi pagar

batas di antara kekuatan politik yang ada. PKS menjadi partai besar yang masuk kubu *match-all programmatic*. Program yang ditawarkan PKS berangkat dari pencitraan sebagai partai bersih, bebas korupsi dan menjadi representasi ideal bagi kemajuan politik karena juga mengusung keberagaman. Sekalipun demikian, PKS masih sangat tertutup dalam kaderisasi politik dan seleksi kandidat. Permainan politik yang diinginkan adalah mendapatkan sumber dukungan politik sebanyak-banyaknya dengan merangkul pemilih dari berbagai kalangan, tetapi tetap menjaga oligarki dan relasi klientelistik partai tersebut (Tomsa 2013, 32). Ciri ini menunjukkan pada satu sisi PKS pragmatis, tetapi pada sisi lain tetap mempertahankan garis politik partai. Pola *match-all programmatic* yang demikian, pada dasarnya hanya mempertebal garis pragmatisme dan oportunisme belaka. Sekalipun menjadikan ideologi atau garis politik tertentu sebagai latar belakang platform mereka, tetapi partai-partai ini membuka peluang seluas-luasnya dengan aneka macam agenda program yang seringkali bertabrakan satu sama lain.

Di kubu *match-all personalistic* terdapat partai Gerindra dan Hanura. Dua partai baru ini mendapatkan perolehan suara yang menjanjikan bagi masa depannya. Prabowo Subianto yang menjadi figur Gerindra mampu menampilkan dirinya sebagai manifestasi bagi kelompok yang secara ekonomi terpinggirkan melalui iklan politik dan jargon ekonomi kerakyatan. Strategi tersebut memberikan pagar batas ideologi antara Gerindra dengan partai lain, seperti Golkar. Namun, bagaimanapun Gerindra tidak menutup rapat-rapat bagi kompromi dan negosiasi dalam membentuk basis dukungan sebagaimana tampak ketika melakukan kesepakatan politik dengan PKB-Gus Dur di Jawa Timur. Platform yang hampir sama juga diusung oleh Hanura. Figur Wiranto lebih kuat sebagai faktor menarik dukungan daripada platform Hanura yang masih mengambang. Dalam kubu partai *match-all personalistic*, proporsi figur menjadi sangat menentukan dalam memberikan *hints* bagi perluasan basis konstituen. Karakteristik pada Gerindra dan Hanura, yang lahir tanpa memiliki kedekatan dengan organisasi massa yang sudah ada

sebelumnya inilah yang memberinya karakteristik sebagai partai *match-all personalistic*.

Tabel 1: Karakteristik dari Masing-Masing Parpol Sesuai dengan Spesiesnya

Karakteristik	Catch-All Party		Match All Party	
	Personalistik	Programatik	Personalistik	Programatik
Basis Massa	Tradisional	Peralihan	Tradisional terbuka	Lintas Batas
Pola Organisasi	Patrimonial Klientilisme	Cair	Agresif keluar	Agresif
Formulasi Kebijakan	Dikendalikan elit-nya	Dikendalikan oleh isu publik	Dikendalikan oleh Oligarki	Dikendalikan oleh kepentingan umum
Implementasi Kebijakan	Cepat berubah-ubah	Relatif konsisten	Tidak terukur	Relatif konsisten
Kutub Koalisi	Match all-programatik	Catch all-personalistik	Catch-all personalistik	Catch all-personalistik
Manajemen Konflik	Keluargaan	Terlembaga	Campuran	Terlembaga

Tabel 1 menggambarkan jenis organisasi kepartaian setelah pemilu 2009. Jika melihat klasifikasi spesies partai tersebut, partai yang paling mudah dilihat spektrum legitimasinya adalah partai personalistik. Sebagai partai yang memang disediakan bagi pemimpin partai untuk memenangkan pemilu dan menjalankan kekuasaan, figur, citra, popularitas dan kharisma pemimpin sangat menentukan. Partai personalistik digambarkan memiliki organisasi yang lemah dan oportunistik. Nominasi terhadap kandidat atau pengurus, mobilisasi dukungan dan pemenangan pemilu, hingga pengambilan keputusan-keputusan politik, berada pada figur pemimpin partai (Gunther and Diamond 2001, 27). Melihat hal itu, spektrum legitimasi pada partai personalistik menjadi terpusat pada pemimpin partai.

Berbeda halnya dengan partai personalistik, partai programatik mendasarkan pada konsistensi program atau platform – meski peran ideologi terlihat memudar, tetapi pengaruh ideologi masih terasa kental, sehingga partai ini memiliki landasan yang lebih mapan. Dalam pemilu, agenda dan program legislatif dan pemerintahan partai programatik lebih tampak dibandingkan partai lain dalam klasifikasi partai elektoral. Di samping itu, partai jenis ini biasanya memiliki basis sosial yang je-

las meski tak tidak luas. Partai programatik lebih dekat dengan model partai klasik berbasis massa (Gunther and Diamond 2001, 27-28). Jika melihat adanya nilai-nilai atau ideologi yang kental dan menjadi ikatan antara partai dan konstituen, spektrum legitimasi partai *programmatic* terletak pada konsistensi nilai-nilai dan program partai.

Spektrum legitimasi yang lebih beragam adalah pada partai *catch-all*. Sifat partai *catch-all* yang cenderung terbuka, keanggotaan yang beragam, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan stuktur masyarakat untuk mendapatkan suara dari seluruh lapisan masyarakat, menjadikan spektrum legitimasi bersandar pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan pragmatis. Dalam klasifikasi spesies partai yang dilakukan oleh Richard Gunter dan Larry Diamond (2001), partai *catch-all* digambarkan sebagai partai yang berupaya untuk memperluas daya tarik elektoral, cenderung selektif dalam hal orientasi dan dukungan terhadap kebijakan sesuai dengan suasana hati publik. Dibandingkan dengan dua spesies partai lain yang digambarkan oleh Gunther dan Diamond, partai *catch-all* relatif tidak memiliki konsistensi program atau ideologi dan tidak tergantung pada figur ketua atau pendiri partai. Jika menilik dari segi perkembangan partai politik, menurut Otto Kirchheimer (dalam Amal 2012, 57), partai *catch-all* tak lagi bergantung pada satu figur dalam pemilu, dan tak mendasarkan pada satu ideologi atau platform dalam menentukan sikap politik.¹ Jika melihat kecenderungan tersebut pada partai *catch-all*, maka spektrum legitimasi partai ini adalah pada pertimbangan rasional partai. Pusat-pusat kekuasaan dan kewenangan yang tersebar menjadikan pertimbangan rasional sebagai landasan penentuan keputusan-keputusan politik.

Bagaimana dengan konseptualisasi partai *match-all* dan spektrum legitimasinya? Sebagai fenomena dan kecenderungan baru dalam perkembangan partai politik dan sebagai antonim dari partai *catch-all* di

¹ Perlu dicatat bahwa klasifikasi spesies partai politik oleh Gunther dan Diamond dalam konseptualisasi tentang partai *catch-all* tidak secara keseluruhan mendasarkan pada konseptualisasi yang dilakukan oleh Kirchheimer – walaupun dalam beberapa hal penting masih menjadi perhatian. Konseptualisasi oleh Kirchheimer tentang partai *catch-all* menggambarkan perkembangan dan transformasi partai-partai politik besar pasca Perang Dunia II, yang berhasil mengatasi batas-batas tradisional dan struktural (Amal, 2012).

Indonesia, partai *match-all* memadukan semua unsur dari pencapaian dan atribut dominan yang melekat. Jika partai *catch-all* tak lagi mengandalkan kelompok inti dan basis sosial yang pernah mereka bangun dalam meraih dukungan, partai *match-all* punya kecenderungan yang sama. Hanya saja, partai *match-all* tak memiliki basis dukungan sebelumnya dan tak memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok sosial ketika partai dibentuk. Ciri ini paling tampak pada tipikal partai baru di Indonesia, tanpa identitas politik yang jelas, sehingga dalam pemilu mereka merangkul semua kelompok sosial sebanyak mungkin. Hal ini yang kemudian menjadikan partai *match-all* menjadi pragmatis. Spektrum legitimasi partai *match-all*, seperti halnya partai *catch-all*, mendasarkan pada pertimbangan dan pilihan rasional. Tipikal partai *match-all* akhirnya memanfaatkan celah pragmatisme dalam tiap momen politik.

PRAGMATISME SEBAGAI UNSUR PEMBENTUK MATCH-ALL PARTY

Di negara-negara yang termasuk bagian gelombang demokratisasi ketiga, partai politik yang terorganisir dengan baik merupakan kebutuhan yang sangat penting. Salah satu pengorganisasian partai adalah pada perumusan platform politik dan agenda-agenda yang disusun untuk ditawarkan kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan. Perbedaan platform dan program mendefinisikan posisi politik partai politik dan dapat membentuk interaksi partai politik pada momen politik tertentu. Meski demikian, interaksi antar partai juga dipengaruhi oleh sistem kepartaian yang dianut. Sebagaimana di Asia dan Pasifik, partai politik baru yang dibentuk berdasarkan etnis atau jaringan berbasis patronase membuat kesulitan tersendiri dalam menciptakan stabilitas pemerintahan (Reilly 2001, 4).

Persoalan pelembagaan partai politik juga berkenaan dengan penerapan sistem kepartaian dengan sistem pemerintahan. Dalam banyak kajian politik tentang sistem politik, sistem presidensial dinilai tidak cocok jika berjalan dengan sistem multipartai (Shugart and Carey 1992, 33). Bagi partai politik, kondisi tersebut memberi struktur kesempatan politik terciptanya kondisi politik yang cenderung pragmatis, salah

satunya ditunjukkan dengan perubahan sikap partai dalam berbagai momen politik. Dalam kondisi demikian, partai politik di satu sisi memainkan peran dalam mendukung dan menghambat program pemerintah, di satu sisi juga dituntut beradaptasi dengan tawar-menawar politik yang memberinya keuntungan. Perubahan sikap partai politik ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya dalam artikel ini.

Sedangkan bagi presiden, struktur politik multipartai, memaksa presiden berkompromi dengan banyak partai untuk memperoleh dukungan. Cara paling lazim dan efektif adalah dengan membagi alokasi kursi di kabinet kepada partai-partai koalisi. Jika kemudian presiden gagal mengelola koalisi, atau bahkan mengelola dukungan sejak awal pemerintahan, maka sulit sekali baginya untuk mendapatkan dukungan yang stabil di parlemen. Setidaknya, hal tersebut di atas yang tampak pada pemerintahan Yudhoyono sebagai presiden dalam dua periode masa jabatannya dari 2004-2014. Pada periode pertama, Yudhoyono harus memasukkan lebih banyak perwakilan partai atau orang-orang usulan partai, dibanding dari kalangan profesional, ke dalam kabinetnya. Partai Demokrat sebagai partai pengusung, tidak mempunyai suara signifikan untuk terlibat mengendalikan legislasi di DPR. Dalam periode kedua, meski perolehan kursi Partai Demokrat naik tajam, tetapi kebutuhan terhadap dukungan politik yang lebih besar masih diperlukan. Sebagian besar kabinet juga masih diisi oleh perwakilan partai sebagai cara mengikat komitmen dalam koalisi.

Dalam 10 tahun, perjalanan pemerintahan Yudhoyono mengalami banyak hambatan politik yang menguji komitmen koalisi. Beberapa ganjalan terhadap pemerintah justru diinisiasi dan didukung oleh partai-partai koalisi. Pasca pemilu 2009, terdapat beberapa momen politik yang menjadi catatan penting yang menunjukkan kerentanan sistem presidensial-multipartai. Pertama, dalam membentuk ikatan komitmen antar partai, kedekatan ideologi, platform dan program kepartaian tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Semua partai dipaksa berkompromi dan bernegosiasi atas dasar keuntungan masing-masing. Absennya koalisi yang diikat dengan alasan ideologi, nilai-nilai dasar dan gagasan-gagas-

an platformis, menyebabkan koalisi yang terbentuk mudah berubah karena dibangun di atas pondasi yang pragmatis.

Kedua, terdapat tarikan kepentingan yang kuat antara presiden dan partai-partai. Hal tersebut tampak dari pilihan kompromi oleh presiden kepada partai-partai dalam pembentukan kabinet. Proses ini bukan saja sebagai cara presiden memperoleh dukungan partai, tetapi juga memperkuat posisi tawarnya. Ketika hubungan presiden dengan partai koalisi bermasalah, atau terdapat upaya dari partai-partai koalisi untuk menghambat kinerja dan mereduksi citra pemerintahan, presiden bisa memunculkan wacana *reshuffle* untuk memberi sinyal agar partai-partai kembali “patuh” dalam komitmen koalisi.

Ketiga, pemerintahan kerap dibayangi dengan ancaman pemakzulan. Ancaman ini beberapa kali disuarakan oleh orang-orang partai melalui media. Meskipun faktanya, pemakzulan tak pernah terjadi. Di banyak negara yang menganut sistem presidensial, pemakzulan, sekalipun terjadi di beberapa negara di Amerika Tengah, relatif sangat jarang terjadi (Mainwaring dalam Dahl, Shapiro and Cheibub 2003, 267). Di Indonesia, proses pemakzulan menyisakan rasa trauma pada pemerintahan terpilih, karena pengalaman yang pernah terjadi di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Beberapa isu yang memunculkan kekhawatiran pemakzulan, baik itu yang mengarah kepada presiden maupun wakil presiden, seperti kasus Century, misalnya, memaksa pemerintahan Yudhoyono-Boediono membuka ruang negosiasi dan kompromi lebih lebar terhadap kepentingan-kepentingan partai. Upaya tersebut dilakukan untuk memberi pondasi stabilitas agar terhindar dari kemungkinan paling buruk bagi berjalannya pemerintah. Keempat, akumulasi dari persoalan-persoalan tersebut menyedot perhatian politik tersendiri. Desain sistem presidensial-multipartai, menjadikan laju pemerintahan tidak efektif karena terhambat oleh kerja-kerja politik lain yang juga menguras energi.

Persoalan tersebut memunculkan usaha untuk menciptakan jumlah partai politik yang efektif. Kebutuhan untuk membentuk dan memantapkan partai politik nasional menjadi sedemikian mendesak dalam rangka mengeliminasi sengkabut kepentingan politik personal elite

yang mengatasmakan kepentingan banyak pihak melalui partai politiknya. Pun demikian, perlu diatur prasyarat dukungan yang bersifat nasional menjadi bagian terpenting untuk membentuk sebuah agregasi atas kepentingan yang luas dan merata. Prasyarat ini dapat diwujudkan melalui undang-undang. Sehingga, sejak ditentukannya peserta pemilu, pola parpol nasional akan memunculkan jumlah parpol yang efektif. Dari penghitungan *Effective Number of Parties Parliament* (ENPP).² Jumlah ENPP dari hasil Pemilihan Umum 2004 adalah 7,07 dengan 17 partai politik di DPR. Hasil Pemilu 2009, setelah diberlakukan ambang batas (*threshold*) 2.5%, terdapat sembilan partai di DPR dengan ENPP sebesar 6,20. Semakin rendah ENPP, semakin mudah membuat koalisi dan terjaminnya stabilitas pemerintahan. Sebenarnya hasil Pemilu 1999 menghasilkan ENPP sebesar lima partai dengan peserta pemilu 48 partai mempunyai peluang untuk menata koalisi di parlemen yang baik. Partai yang meraih suara di atas 20% saat itu, misalnya PDIP dan Golkar, sebenarnya berpeluang besar untuk membuat komitmen koalisi jangka panjang dalam mendukung pemerintahan yang kuat (Aminuddin 2011).

Tabel 2: Perbandingan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik

Pemilu Partai Politik	2004		2009	
	Suara	Kursi	Suara	Kursi
Partai Demokrat	7.5	57	20.8	148
Partai Golkar	21.6	128	14.5	108
PDIP	18.5	109	14.0	93
PKS	7.3	45	7.9	59
PAN	6.4	52	6.0	42
PPP	8.2	58	5.3	39
PKB	10.6	52	5.0	26
Gerindra	-	-	4.5	30
Hanura	-	-	3.8	15

Sumber: KPU

Dalam Tabel 2 terlihat tidak dijumpai partai besar yang mendapatkan perolehan suara yang stabil. Dalam pemilu 2004 dan 2009, tingkat pergeseran suara dapat dikatakan tergolong tinggi. Fluktuasi suara yang

² Formula yang dirumuskan oleh Dari hasil penjumlahan menurut formula Laakso & Taagepera (1979) yakni $ENPP = 1 / (\sum s_i)^2$ $i=1$.

demikian mengindikasikan pelembagaan kepartaian yang rendah sehingga partai hanya mengandalkan penambahan suara dalam jumlah besar dari pemilih mengambang. Selain itu, gejala pragmatisme menunjukkan kemunduran serius bagi pengelolaan partai karena hanya berorientasi pada perolehan suara belaka. Sikap parpol yang kurang berani untuk menegaskan identitas dan konsistensi atas pandangan politiknya berdampak serius dalam pelembagaan sistem kepartaian. Peran partai besar yang bukan tergolong mayoritas di parlemen tidak begitu tampak menonjol untuk menyuarakan kebijakan yang sesuai dengan ciri khas partainya. Dampaknya, partai politik tidak membawa perubahan yang signifikan dalam pelembagaan platform sebagai ciri khas pembangunan kepartaian. Partai hanya menyumbang sedikit kemajuan dalam membangun platform kebijakan yang koheren (Sherlock 2009).

Secara umum, basis analisa untuk memahami politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konsep politik aliran (King 2003; Baswedan 2004; Paige Johnson Tan 2004; Ufen 2006). Namun, banyak pihak yang menyadari kekurangan politik aliran sebagai basis analisis, terutama disebabkan oleh kaburnya batasan antara manifestasi politik Islam yang tidak begitu saja bisa direduksi menjadi pembilahan *abangan*, *santri* dan *priyayi*. Liddle (2003) misalnya, mengkontekstualisasikan basis legitimasi politik Islam dalam kapasitasnya sebagai bagian yang mewakili model antara kesalehan (*piety*) dan sikap pragmatis (*pragmatism*). Menurut Liddle, kelompok *abangan* dan *priyayi* telah mengalami stagnasi yang disebabkan oleh mengerucutnya ideologi nasionalis dan sekuler.

Hampir tidak ada pilihan bagi kelompok politik Islam untuk menegaskan pilihan politiknya dalam spektrum di luar partai politik nasionalis dan sekuler atau yang membawa dua kepentingan tersebut secara bersamaan. Sementara kelompok *santri* justru menemukan momentumnya dengan meluaskan pilihan-pilihan politiknya. Perkembangan dalam kelompok *santri* misalnya memungkinkan munculnya kelompok Islam liberal, fundamentalis dan moderat. Kelompok ini bukanlah sempalan melainkan percabangan dari politik Islam. Pembacaan Liddle di atas menemukan relevansinya ketika perolehan suara yang diraih

oleh partai politik berbasis Islam bisa diwakili oleh partai politik yang bervariasi seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PKB, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, partai politik berbasis Islam pun mengalami penurunan dari 32% pada pemilu 2004 menjadi 29%. Penjelasan dari hal tersebut disebabkan oleh berlarutnya persoalan internal partai politik Islam sendiri atau tiadanya bentuk yang jelas dari gerakan Islam politik (Mietzner 2009, 12-15). Selain itu juga pemilih muslim tidak lagi mempercayakan pilihan politiknya pada partai berlabel Islam (Ratnawati and Haris 2008, 12). Namun bisa juga dijelaskan bahwa partai politik berbasis sentimen agama, faksionalisme atau primordialisme akan kalah dengan partai yang bekerja dengan basis pengelolaan isu publik dan pencitraan.

Mobilisasi yang dilakukan partai sangat tergantung dari dua hal utama yakni perubahan atau pergeseran perilaku pemilih dan variasi isu publik yang muncul di permukaan. Partai Demokrat yang bisa meraup perolehan suara dengan begitu fantastis bukanlah disebabkan oleh kemampuan mengelola partai, melainkan lebih banyak disebabkan keuntungan-keuntungan dari luar sebagai pendorong. Citra politik Yudhoyono yang bagus memungkinkan terbentuknya afirmasi pemilih yang condong untuk mengikuti pilihan politik berdasarkan hasil pencitraan yang dibentuk, terutama melalui media massa dan saluran-saluran pemerintahannya. Hasil akhir yang menempatkan Partai Demokrat memperoleh 20.8% suara dalam pemilu 2009 memunculkan analisis mudarnya politik aliran dan bangkitnya apa yang disebut sebagai pemilih rasional atau rasionalitas pemilih.

Mobilisasi yang tidak dilakukan melalui saluran kelembagaan menyebabkan pergeseran pada identifikasi kepartaian. Pragmatisme menjadi alasan yang efektif bagi partai dan juga pemilihnya dalam membentuk identitas politiknya. Mobilisasi melalui sentimen ideologi menjadi sedemikian kabur saat partai menawarkan cara baru dalam memaknai partisipasi politik konstituen. Perdebatan penting dalam pemilu 2009 terkait dengan arah ideologi ekonomi, antara ekonomi neoliberal dengan ekonomi kerakyatan, sedemikian hangat. Isu publik tersebut meski tidak menarik dan lebih banyak partai yang veraca dalam

spektrum perdebatan dan posisi kebijakan mereka, tetapi lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa opini publik bisa diarahkan dalam memahami pilihan ideologi partai atau kandidatnya. Partai Demokrat dan Golkar mewakili kutub orientasi ekonomi pasar bebas; sementara PDIP, Gerindra dan Hanura menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai simbol perlawanan terhadapnya. Massa dengan status mengambang atau yang telah memutuskan memilih Partai Demokrat dan Golkar hanya membutuhkan sedikit penjelasan untuk merasa terpuaskan dan enggan beranjak dari pilihan semula.

Dalam jangka pendek, pragmatisme cukup efektif dan menguntungkan bagi partai. Konstituen hanya perlu dimanjakan oleh kampanye sesaat yang berbuih-buih. Media massa memberikan dampak yang cukup meluas dalam membentuk persepsi publik. Demikian juga perang hasil survei publik tentang elektabilitas partai pada masa-masa kampanye yang panjang dalam pemilu 2009 yang lalu. Sebaliknya, pragmatisme tidak begitu menguntungkan dalam jangka panjang bagi pembangunan partai. Tingkat volatilitas partai akan semakin tinggi sementara pelembagaan mekanisme organisasi akan terhambat dengan strategi-strategi yang pada akhirnya dirumuskan secara sporadis dan melemahkan identifikasi kepartaian. Survei yang dilakukan oleh IFES pasca pemilu 1999 mendapatkan hasil mengenai lunturnya identifikasi kepartaian oleh pemilih. Sebanyak 27% responden pemilih tidak mengidentifikasi dirinya terhadap partai manapun. Sementara faktor ideologi dan kebijakan partai bukanlah hal yang penting. Di antara 33% responden menjawab suka terhadap posisi partai saat ini (tahun 1999), 11% suka pada pemimpinnya, 2% atas saran kerabat dan hanya 1% yang mengikuti ajakan pengurus partai (Wagner 1999, 23).

Dalam kategori perluasan dampak bagi pembentukan institusi demokratis yang stabil, pragmatisme menyebabkan tiga persoalan. Pertama, ikut memperkuat proses pelemahan ingatan pemilih terhadap kontribusi partai terhadap kehidupan politik. Geliat partai hanya dirasakan ketika menjelang pemilu saja. Sementara dalam kehidupan politik pasca pemilu, sorotan atas kebijakan publik diarahkan pada lembaga legislatif dan eksekutif. Partai melakukan sosialisasi politik rata-rata satu

tahun menjelang pemilu. Proses rekrutmen dan seleksi kandidat memang dilakukan pada masa-masa penyusunan daftar calon legislatif. Survei yang dilakukan oleh IndoBarometer pada tahun 2008 menyebut 30% pemilih belum menentukan pilihan dan hanya 25% pemilih yang mengidentifikasi diri dekat dengan partai tertentu (Qodari 2008).

Kedua, partai akan menjadi kekuatan politik yang bekerja dengan dampak yang cenderung minimal. Tolak ukur paling sederhana untuk mengukur kinerja sebuah lembaga politik adalah output atau hasil yang dicapai oleh lembaga tersebut. Sementara untuk mengukur hasil pencapaian, indikator utamanya adalah pada sejauh mana fungsi-fungsi lembaga tersebut bekerja dan dijalankan oleh instrumen dalam lembaga. Kinerja partai tak banyak dirasakan oleh publik, bahkan cenderung tidak mengatasi persoalan publik. Kepentingan publik dengan demikian tersandera oleh kepentingan partai. Di samping itu, baik anggota dewan maupun partai politik tak pernah secara luas melaporkan kerja-kerja yang dilakukan partai dan prestasi yang pernah dicapai secara berkala. Klaim dan jargon keberhasilan partai politik lagi-lagi hanya disuarakan ketika menjelang pemilu.

Ketiga, menciptakan kebuntuan saluran politik antara warga dengan negara. Minimnya inisiatif partai politik untuk membuka ruang dan saluran komunikasi politik secara efektif, menjadikan partai politik terfragmentasi dengan kepentingan publik. Dalam survei LSI tahun 2009 tentang legitimasi demokratik wakil rakyat, keyakinan publik pada kemampuan partai menyuarakan kepentingan rakyat jauh lebih sedikit dibanding keyakinan pada media massa dan ormas (Lembaga Survei Indonesia 2009). Proses-proses politik yang pragmatis menjadikan kebutuhan membangun saluran komunikasi yang efektif belum menjadi prioritas dan kebutuhan fundamental.

Berkembangnya proses politik yang pragmatis salah satunya ditunjukkan dengan tumbuhnya pemilih rasional dan transaksional jangka pendek. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan penggunaan politik uang dalam pemilu, yang ternyata juga dimanfaatkan oleh partai politik untuk mendulang suara. Partai politik tak hanya terjebak pada situasi tersebut, tetapi justru turut berkubang dan cenderung menum-

buhkembangkan situasi transaksional. Politik uang pun sudah menjadi persoalan serius (Hamidi et.al 2003). Ujungnya, partai dinilai sarang koruptor dan bekerja demi kepentingan ekonomi-politik elite partai. Survei LSI tahun 2011, tentang kepercayaan publik pada pemberantasan korupsi, Partai politik” dan DPR merupakan dua lembaga yang dipersepsikan paling tidak bersih (Lembaga Survei Indonesia 2011).

Seiring meningkatnya pemilih yang cenderung pragmatis, rasional dan transaksional, partai politik di Indonesia semakin mendekati konsepsi tentang partai politik pasar bebas yang kompetitif, lebih berpusat pada figur atau kandidat, dan menekankan fokus kinerja utama lebih pada berbagai momen pemilihan umum. Fenomena semacam ini memperlihatkan pergeseran organisasional dan fungsional dari partai politik dari yang sangat ideologis hingga akhirnya cenderung ke “tengah” dan pragmatis. Hal ini lebih lanjut memunculkan pertanyaan fundamental tentang keberlangsungan peran partai politik dan tingkat relevansi, interaksi serta relasinya dengan masyarakat. Fenomena yang mewakili kondisi ini salah satunya diperlihatkan ketika partai politik bergantung sangat besar pada pendanaan non-partai ketika pemilu. Implikasi yang paling tampak bukan hanya pada kemandirian elektoral saja, tetapi juga kecenderungan untuk mengabaikan fungsi utama dan penting partai politik sebagai wadah representasi antara masyarakat dengan negara. Partai politik akhirnya terjebak pada sikap yang lebih terbuka, longgar dan akomodatif terhadap tuntutan eksternal yang bukan menjadi komitmen utama partai politik. Dalam kondisi ini, partai *match-all* justru bisa berkembang dengan baik.

PERSOALAN PRAGMATISME POLITIK DAN MASA DEPAN *MATCH-ALL PARTY*

Dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 1999 adalah 93,3%, Sementara itu, pada pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi masyarakat turun menjadi 84,07%, dan dalam Pileg 2009 turun lagi menjadi 70,99%. Sementara dalam jajak pendapat lainnya yang dilakukan Litbang Kompas selama September 2008 hingga Januari 2009 (Litbang Kompas 2009), citra

partai politik masih dianggap buruk. September 2008, 70.1% responden juga menyatakan bahwa citra partai politik buruk. Pada bulan November 2008, terdapat 60.4% responden yang menyatakan citra partai politik buruk. Selanjutnya pada bulan Desember 2008, responden yang menyatakan citra partai politik buruk mencapai 53,8%. Menjelang pemilu, pada bulan Januari 2009, terdapat 57.2% responden yang menyatakan citra partai politik buruk. Dari data tersebut terlihat bahwa meski proporsi responden yang menyatakan bahwa citra partai politik buruk cenderung menurun, tetapi citra partai politik relatif masih dianggap buruk, karena penilaian negatif partai politik masih di atas 50%.

Tabel 3. Citra Partai Politik Menjelang Pemilu 2009

Citra Partai Bulan	Buruk (%)	Baik (%)	Tidak Tahu/ Tidak Jawab (%)
September 2008	70,1	23,8	6,1
November 2008	60,4	33,8	5,8
Desember 2008	53,8	38,3	7,9
Januari 2009	57,2	39,6	3,2

Sumber: Litbang Kompas 2009. "Berharap pada Koalisi Partai 'Berwarna'". *Kompas*. 12 Januari, 2009

Setahun pasca pemilu 2009, rupanya citra partai politik di mata publik belum beranjak dari stagnasi ketidakpuasan dibandingkan ketika menjelang pemilu. Survei Litbang Kompas pada 26-27 Mei 2010 (Litbang Kompas 2010), memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan peran partai politik. Upaya partai dalam mengaspirasikan kepentingan masyarakat, memberikan pendidikan politik, dan rekuritmen atau kaderisasi, masih dinilai negatif. Begitu juga fungsi partai politik dalam mengontrol kinerja pemerintah yang masih dinilai kurang memadai.

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Partai Politik Pasca Pemilu 2009

Peran Partai	Tingkat Kepuasan		
	Tidak Puas (%)	Puas (%)	Tidak tahu/ tidak menjawab (%)
Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat	68,9	25,9	5,2
Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat	68,6	23,8	7,6
Melakukan Kaderisasi anggota	58,6	28,2	13,2

Peran Partai	Tingkat Kepuasan		
	Tidak Puas (%)	Puas (%)	Tidak tahu/ tidak menjawab (%)
Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah	60,9	31,6	7,5
Menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	55,4	36,6	8,0
Memperjuangkan demokratisasi	58,9	35,1	6,0
Mendukung gerakan anti-korupsi, kolusi dan nepotisme	51,2	44,3	4,5
Memperjuangkan hak asasi manusia	53,9	40,5	5,6
Mendukung penegakan hukum yang adil	58,8	36,9	4,3

Sumber: Litbang Kompas. 2010. "Saatnya Titik Balik Partai Politik". *Kompas*. 31 Mei.

Setahun menjelang pemilu 2014, survei Litbang Kompas juga menunjukkan citra partai yang juga tak kunjung membaik. Sebanyak 85,85 responden dalam jajak pendapat Kompas yang diadakan pada 27 Februari – 1 Maret 2013, menilai partai politik belum bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebanyak 59,1% responden juga menilai partai politik belum siap untuk mengikuti pemilu 2014 (Litbang Kompas 2013). Jika mengamati berbagai hasil survei di atas, persoalan terkait citra dan fungsi partai politik masih menjadi perhatian publik hingga pemilu 2014.

Melacak komitmen partai untuk mendasarkan setiap kebijakannya dengan berangkat dari platform partai bisa dilihat dari derajat perhatian terhadap isu-isu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Bentuk penanganannya sangat tergantung dari masing-masing partai politik dan dari sini bisa diketahui tingkat hubungan ideologi partai dengan model penyelesaian masalah yang mereka tawarkan dalam masa kampanye. Kepercayaan publik belum terlalu mendapatkan perhatian serius dimana partai akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat komunikasi yang saling bersambut dengan konstituennya.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IFES (2005), pemilih Indonesia lebih mampu mengingat enam partai peserta pemilu. Partai-partai tersebut merupakan partai yang relatif bisa menjaga eksistensi mereka dalam arena politik nasional. Golkar, PDIP, PKB, PPP dan PAN banyak diingat oleh publik, sekalipun bukan melalui program yang ditawarkan, melainkan lebih pada sensasi politik dan konflik internal organisasi yang diekspos oleh media massa. Sementara itu, melekatnya

figur publik yang dominan dalam partai mampu mengangkat tingkat popularitas partai yang bersangkutan. Dalam survei yang sama, tahun 2003, Partai Demokrat belum dikenal, namun sejak nominasi Yudhoyono sebagai presiden, partai tersebut langsung mempunyai popularitas tinggi. Partai lain, seperti PKS, relatif tidak banyak mengalami konflik internal dan juga tidak nampak figur yang dominatif. Partai ini banyak dikenal lebih karena program anti korupsi dan komitmen yang tegas terhadap pemberantasan korupsi yang dimulai dari kader-kadernya. Hasilnya, PKS mampu menampilkan dirinya sebagai partai yang bersih pada pemilu 2004.

Partai Demokrat mengantongi suara yang signifikan karena faktor kepemimpinan Yudhoyono. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang digelar akhir 2008 menempatkan Partai Demokrat dipilih oleh 23% responden, disusul PDIP 17.1% dan Golkar 13.3%. Menurut Saiful Mujani, evaluasi atas kondisi makro dan kinerja pemerintahan Yudhoyono membuat citra Demokrat cenderung menanjak. Selain itu faktor kampanye pencitraan melalui media massa juga berpengaruh seiring pembuktian Demokrat sebagai partai yang bebas korupsi (detik.com 2009). Faktor Yudhoyono yang menentukan dan menjadi magnet penarik pemilih bagi Demokrat memang teruji.

Jika mengamati apa yang terjadi pada pemilu tahun 2004 dan 2009, terjadi pergeseran motif atau alasan publik dalam memilih partai politik. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menjelang pemilu 2009, menunjukkan bahwa pada pemilu 2004 citra tokoh atau elite partai dan kelembagaan partai, serta alasan kecocokan visi-misi, program dan janji-janji partai, masih menjadi daya tarik utama dalam memilih partai. Tidak banyak responden yang memilih partai karena didasarkan oleh alasan-alasan pragmatis. Sedangkan menjelang pemilu 2009, terjadi pergeseran dalam motif memilih partai. Kecenderungan pilihan justru diwarnai dengan menguatnya alasan pragmatis atau sekedar mengikuti pilihan kerabat atau lingkungan sekitar. Di samping itu, citra atau tokoh partai dan lembaga partai juga masih menjadi daya tarik. Sedangkan visi-misi dan program partai justru tidak menjadi daya tarik (Litbang Kompas, 2008).

Jika motif pemilih pada pemilu 2009 cenderung pragmatis, bagaimana kemudian dengan identifikasi partai di masyarakat pasca pemilu 2009 atau menjelang pemilu 2014? Dalam survei yang dilakukan oleh Indikator, yang dirilis pada bulan Desember 2013, identifikasi partai politik di Indonesia ternyata masih sangat rendah. Hanya 14.3% responden yang menyatakan memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. Sebagian besar responden (85.5%) mengatakan tidak memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu (Indikator Politik Indonesia 2013). Jika hanya sedikit masyarakat yang memiliki identifikasi partai, maka investasi oleh partai politik juga masih rendah. Akibatnya, sangat kecil kontinuitas dan stabilitas dukungan terhadap partai tertentu. Peta politik dan prospek elektabilitas parpol mudah bergeser karena pilihan masyarakat dapat berubah.

Di tengah meningkatnya jumlah pemilih rasional, citra, rekam jejak dan kerja politik parpol menjadi komponen dasar dan modal utama sebagai investasi politik. Eksistensi, sikap, dan keputusan partai, serta perilaku elite partai, menjadi modal penting untuk memperoleh dukungan dalam menghadapi pemilu. Aspirasi masyarakat dipandang representatif bila yang mereka kehendaki kurang lebih sama dengan yang menjadi sikap dan perilaku partai politik. Jika yang terjadi sebaliknya, maka akan menjadi masalah bagi partai karena berimplikasi langsung terhadap perilaku pemilih terhadap partai politik. Hal itu dapat terlihat pada perubahan peta dukungan kepada Partai Demokrat pada pemilu 2014. Perolehan suara Partai Demokrat yang pada tahun 2009 mampu bersaing ketat dengan Partai Golkar dan PDIP, pada pemilu 2014 menurun tajam. Suara Partai Demokrat pada pemilu 2009 adalah 21.703.137 suara (20.4% dari total suara sah nasional) sedangkan pada pemilu 2014 turun menjadi 12.728.913 suara (10.19% dari total suara sah nasional). Penurunan ini diyakini paling besar karena keterlibatan sejumlah petinggi dan kader Partai Demokrat yang bermasalah karena kasus korupsi. Figur Yudhoyono sebagai presiden, serta sebagai dewan pembina sekaligus ketua umum partai juga diyakini turut menjadi faktor yang mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat.

Sedangkan PKS, meski juga didera persoalan yang cukup serius, karena ketua partainya diduga terlibat dalam kasus suap, perolehan suara PKS mengalami kenaikan, meski perolehan kursi menurun. PKS yang pada pemilu 2009 memperoleh suara sebesar 8.204.946 suara (7.88% dari total suara sah), dan pada tahun 2014 memperoleh 8.480.204 suara (6.79% dari total suara sah nasional). Perolehan suara ini jauh dari ekspektasi PKS yang pada pemilu 2014 menargetkan menjadi partai dengan suara perolehan terbesar ketiga. Target tersebut sebenarnya masuk akal karena sebagai partai *catch-all programmatic*, PKS berhasil membangun citra sebagai partai bersih dan jujur. Isu keterlibatan sejumlah kader dan petinggi parpol dalam kasus korupsi, menjadi faktor yang paling mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Partai Demokrat dan PKS. Persepsi publik menjelang pemilu 2014 terhadap Partai Demokrat dan PKS berubah, dari partai yang dinilai prospektif dan solid, menjadi partai yang dinilai paling tidak siap menghadapi pemilu 2014. Tidak saja terjadi penurunan citra partai, tetapi identitas positif yang sempat disematkan pada kedua partai ini juga luntur.

Aktualisasi spektrum legitimasi di dalam partai politik pada analisis tentang spesies partai dalam bagian sebelumnya, terutama dalam klasifikasi partai elektoralis menarik untuk dianalisis. Selanjutnya, yang juga menarik adalah membuktikan dan menunjukkan posisi konseptualisasi partai *match-all* di antara klasifikasi partai-partai elektoralis yang sudah ada. Selain itu, perlu mencermati kecenderungan koalisi pasca pemilu 2009, terutama untuk melihat kecenderungan sikap politik partai-partai, terutama partai *match-all*, dalam momen pemilu dan di antara dua pemilu. Spektrum legitimasi di sini berkenaan dengan letak pusat kekuasaan dan kewenangan dalam partai politik. Pada momen pemilu dan dinamika politik di antara dua pemilu, apa yang menjadi dasar keputusan-keputusan partai. Apakah berdasarkan pada keputusan elite, garis ideologi partai, atau pertimbangan-pertimbangan rasional.

Peta dan arah koalisi pada dasarnya dapat diamati pada tiga momen, pertama, ketika koalisi memilih pasangan presiden-wakil presiden, kedua, koalisi dalam pemerintahan (pembentukan kabinet), dan ketiga, koalisi dalam isu-isu sensitif dan strategis. Pada bagian ini dapat kita

amati pergeseran-pergeseran pada peta koalisi dalam momen politik yang berbeda. Koalisi pasca reformasi diwarnai dengan semakin melemahnya demarkasi ideologi, program maupun eksistensi historis di antara partai. Koalisi di antara partai menjadi sangat cair, cenderung temporal dan tidak terpola. Kondisi demikian dapat dilihat pada peta dan arah koalisi pada tiga momen politik yakni koalisi untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden, koalisi dalam pemerintahan (komposisi dalam kabinet) dan koalisi dalam isu-isu sensitif dan strategis.

Dalam koalisi untuk memilih pasangan capres-cawapres kekuatan figur menjadi sangat menentukan. Dalam tiga kali pemilihan presiden di Indonesia, semua partai akan mencari kalkulasi figur yang paling memungkinkan untuk menang. Karena politik berkenaan dengan kemungkinan-kemungkinan, maka kalkulasi yang tak kalah penting adalah juga soal kemungkinan politik yang akan terjadi. Pasangan dengan elektabilitas figur yang rendah akan berhitung pada skenario yang paling menguntungkan, meski pada posisi yang buruk sekalipun. Misalnya, fenomena pengalihan dukungan massa pendukung pada pasangan figur lain. Peta koalisi pada tiga pasangan kandidat presiden dan wakil presiden pada tahun 2009 menunjukkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto didukung oleh sembilan partai politik dengan persentase 21.6% dukungan partai politik di parlemen. Sementara itu, pasangan Yudhoyono-Boediono didukung oleh 23 parpol dengan total dukungan parpol di parlemen sebesar 56.07%. Pasangan ketiga adalah Wiranto-Jusuf Kalla yang didukung oleh tiga partai, yakni Golkar, Hanura dan PKNU dengan dukungan partai di parlemen sebesar 22.32%.

Pemilu 2009 dimenangkan oleh pasangan Yudhoyono-Boediono dengan perolehan suara 60.8 % suara sah. Praktis, dengan demikian, pilihan partai yang bukan berada di belakang Yudhoyono-Boediono harus memilih antara berkoalisi atau berposisi. Partai Demokrat kemudian membangun koalisi bersama lima partai lain dan menghasilkan dukungan sebanyak 76% kursi di parlemen. Konsekuensinya adalah lingkaran koalisi belum tentu berisi partai yang sejak awal mendukung pencalonan presiden. Partai dalam lingkaran koalisi tidak bertanggung

jawab menaikkan presiden sehingga, koalisi yang terbentuk dapat berubah sewaktu-waktu dan cenderung rapuh. Kecenderungan yang berkembang adalah pola koalisi tidak permanen.

Komitmen koalisi diperkuat dengan penyusunan kabinet yang terpaksa harus mengakomodasi banyak menteri dari partai politik koalisi. Melihat komposisi kabinet dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, tampak bahwa 61% unsur kabinet berasal atau perwakilan dari partai politik, yakni 21 menteri dari 34 menteri, sisanya berasal dari kalangan profesional-birokrat. Sejumlah pos penting untuk peningkatan kinerja ekonomi masih dipegang kalangan partai, seperti Menko Perekonomian (PAN), Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Partai Demokrat), Menteri Perindustrian (Partai Golkar), Menteri Pertanian (PKS), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PKB), serta Menteri Perumahan Rakyat (PPP). Meski mengakomodir banyak partai politik dalam kabinet, koalisi dibangun di atas pondasi yang rapuh. Kerapuhan ditunjukkan dengan dualisme sikap politik partai dalam isu-isu strategis. Jika terdapat kebijakan pemerintah yang populis, partai koalisi mengklaim bagian dari kontribusi koalisi. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tak populer, partai koalisi mengambil posisi yang berbeda, bahkan dalam kutub yang ekstrim sekalipun dengan pemerintah.

Beberapa kebijakan yang menunjukkan pergeseran-pergeseran peta koalisi dan kerapuhan koalisi di antaranya adalah: pertama, pada kasus dana talangan atau *bailout* Bank Century. Selang sebulan pasca pelantikan Yudhoyono-Boediono pada Oktober 2009, partai yang tergabung dalam koalisi, terutama Partai Golkar dan PKS, justru terlibat dalam mempersoalkan kasus Bank Century yang berpotensi menyeret Wapres Boediono. Padahal, di satu sisi, Partai Golkar merupakan inisiator terbentuknya Setgab, tetapi di sisi lain membidani terbentuknya Panitia Khusus DPR untuk kasus dana talangan ke Bank Century (Kompas 2009). Eskalasi awal dan perubahan komposisi koalisi pada kasus *bailout* Bank Century terjadi pada bulan Maret 2010, di mana DPR menyelenggarakan sidang paripurna terkait kasus ini. Konstelasi dan komposisi politik di parlemen mengalami perubahan karena Partai

Golkar dan PKS memilih sikap berlawanan dengan Partai Demokrat. Kekuatan Yudhoyono-Boediono pada sidang paripurna DPR hanya bertumpu pada Partai Demokrat, PAN, dan PKB, dengan kekuatan di DPR hanya 39,64%. Sementara komposisi kekuatan Golkar, PKS, dan PPP di parlemen mencapai 36% (Kompas 2010).

Kedua adalah pada kasus hak angket mafia pajak. Pada Januari 2011, 30 anggota DPR dari sembilan fraksi awalnya menandatangani dukungan penggunaan hak angket kasus mafia pajak (Kompas 2011). Namun usulan ini mengalami pasang surut dukungan dalam perkembangannya. Pasang surut ini juga memperlihatkan betapa sikap politik partai koalisi mudah bergeser (Kompas 2011). Pengerucutan sikap terkait hak angket mafia pajak tampak pada voting pada rapat paripurna DPR pada 22 Februari 2011. 266 anggota DPR menolak hak angket mafia pajak. Penolakan berasal dari Fraksi Partai Demokrat (145 anggota), F-PAN (43), F-PPP (26), F-PKB (26), dan F-Partai Gerindra (26). Sedangkan 264 anggota DPR menerima penggunaan hak angket. Mereka dari Fraksi Partai Golkar (106), F-PDIP (84), F-PKS (56), F-PKB (2), dan F-Partai Hanura (16) (Kompas 2011). Yang menarik adalah bergesernya sikap Gerindra yang juga ikut menolak hak angket.

Ketiga, adalah pada perubahan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2012 terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Komposisi koalisi juga mengalami pergeseran. Sikap partai koalisi cenderung berlawanan dengan pemerintah dan cenderung bergeser dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengerucutan sikap parpol tampak pada rapat paripurna DPR pada 31 Maret 2012 yang memutuskan harga BBM tidak naik per 1 April 2012. Hanya Partai Demokrat yang mendukung kenaikan BBM. Tiga partai koalisi yakni PAN, PPP dan PKB pada dasarnya turut mendukung pemerintah untuk menaikkan harga BBM, namun memilih opsi menunda. Sedangkan PKS dan Partai Golkar, yang awalnya bergabung dengan PDIP, Hanura serta Gerindra untuk tetap menolak kenaikan harga BBM, akhirnya memilih opsi menunda kenaikan BBM.³ Dalam kasus kenaikan BBM, dimensi citra dan persep-

3 Dalam rapat paripurna DPR pada 31 Maret 2012, ujung perdebatan terletak pada substansi Pasal 7 ayat 6A dalam UU APBN Perubahan 2012, soal tambahan ayat yang berbunyi: dalam

si pro-rakyat dibangun meskipun partai koalisi bersikap berbeda dengan partai pendukung pemerintah yang lain.

Tabel 5. Dinamika Sikap Politik Partai Koalisi dan Oposisi di DPR

Persoalan	Partai Koalisi					Partai Oposisi			
	Demokrat	Golkar	PKS	PAN	PPP	PKB	PDI-P	Gerindra	Hanura
Kasus Bank Century (2010)	Opsi A (pro koalisi)*	Opsi C (kontra koalisi)	Opsi C (kontra koalisi)	Opsi A (pro koalisi)	Opsi A (pro koalisi)	Opsi A (pro koalisi)	Opsi C (Pro Oposisi)	Opsi C (Pro Oposisi)	Opsi C (Pro Oposisi)
Pansus Hak Angket Mafia Pajak (2011)	Menolak (Pro Koalisi)	Menerima (kontra koalisi)	Menerima (kontra koalisi)	Menolak (Pro Koalisi)	Menolak (Pro Koalisi)	Menolak (Pro Koalisi)	Menerima (pro oposisi)	Menolak (kontra oposisi)	Menerima (pro oposisi)
Kenaikan Harga BBM (2012)	Mendukung (pro oposisi)	Menunda (kutub tengah)	Menunda (kutub tengah)	Menunda (kutub tengah)	Menunda (kutub tengah)	Menunda (kutub tengah)	Menolak (pro oposisi)	Menolak (pro oposisi)	Menolak (pro oposisi)

Sumber: diolah, 2010-2012

Catatan:

- Pro koalisi: sikap fraksi partai koalisi di DPR mengikuti/mendukung sikap politik pemerintah
- Kontra koalisi: sikap fraksi partai koalisi di DPR berlawanan dengan sikap politik pemerintah
- Pro oposisi: sikap fraksi partai oposisi di DPR berlawanan dengan sikap politik pemerintah
- Kontra oposisi: sikap fraksi partai oposisi di DPR mengikuti mendukung sikap politik pemerintah

Gambaran dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak saja menunjukkan ciri khas sebagai partai *catch-all*, tetapi juga bergerak pada arah ciri khas partai *match-all*. Pergeseran peta koalisi mulai dari pemilu presiden, pembentukan kabinet hingga koalisi di DPR, menunjukkan pergeseran sikap partai seiring dengan dinamika struktur kesempatan politik yang tersedia. Kecenderungan untuk menjadi partai *match-all*, ditunjukkan oleh sikap rasional dan pragmatis hampir semua partai. Partai-partai di Indonesia selalu bergerak ke sumbu yang menurut mereka menguntungkan secara elektoral.

Setidaknya terdapat tiga argumentasi mendasar mengapa kecenderungan sejak pemilu 2009 dan kecenderungan ke depan, partai politik menunjukkan corak sebagai partai *match-all*. Pertama, koalisi dibangun pada pertimbangan peluang elektabilitas. Partai-partai menengah yang sejak awal berada di belakang Yudhoyono-Boediono adalah karena elektabilitas Yudhoyono yang berada jauh di atas kandidat yang lain. Kedua, partai dengan suara besar dalam koalisi memiliki dualisme sikap yang tinggi. Partai Golkar yang tak berkontribusi pada kemenangan Yudho-

hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.

yono-Boediono, dan memperoleh tiga jabatan menteri dalam kabinet, justru kerap menginisiasi sikap politik yang menghambat kinerja pemerintah. Ketiga, sikap partai politik digerakkan oleh dorongan elektoral dalam pasar politik. Situasi pasca pemilu 2009 menunjukkan ketiadaan aktor dominan pada pasar politik. Akibatnya, semua partai politik berusaha mencuri perhatian publik sejak awal dan dalam kesempatan politik apapun. Isu-isu yang menjadi perhatian publik menjadi alat yang dimainkan partai.

PENUTUP

Hampir semua partai politik di Indonesia saat ini, merupakan partai baru atau setidaknya merupakan “peranakan” dari partai lama yang mengalami perubahan pelembagaan dan karakteristik seiring dengan dinamika yang berkembang pasca reformasi. Sedangkan partai-partai yang sebelumnya telah terbentuk sejak Orde Baru (Golkar dan PPP), dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan baik di internal dan eksternal partai. Bagi partai-partai baru yang kemudian gagal memperoleh kursi, atau memperoleh sedikit kursi kemudian tersingkir sejak tahun 2009 karena aturan *parliamentary threshold*, atau bertahan hingga pasca pemilu 2014, partai-partai ini cenderung memanfaatkan potensi pragmatis yang berkembang. Partai-partai inilah yang dalam artikel ini dikategorisasikan sebagai *match-all party*.

Ciri khas yang tampak oleh partai-partai *match-all*, dan tak tertangkap dalam klasifikasi spesies partai elektoralis Gunther dan Diamond, adalah pada ketiadaan atau minimnya modal sosial sebelum partai ini lahir dan berkembang. Figur menjadi instrumen utama dalam pasar politik, di samping jargon platform dan program yang kerap tak menarik perhatian pemilih. Lemahnya figur dan konsistensi program, menjadikan partai kategori *match-all* harus memanfaatkan segala kemungkinan dan kondisi yang memberikan mereka keuntungan baik dalam dimensi citra maupun materiil. Gerak politik *match-all party* mengabaikan pembatasan ideologi, platform dan strategi untuk mengimplementasikan program-programnya.

Pada pemilu dan pasca pemilu 2014 kecenderungan bertindak sebagai partai *match-all* kian tampak. Pertama, semua kandidat yang diusung partai, mencoba menjajaki kerjasama politik dengan semua kandidat lain, tanpa melihat kesesuaian ideologi, platform dan program. Sepanjang proses tersebut, kemungkinan kegagalan mengawinkan bakal kandidat terjadi ketika tidak ada titik temu soal berapa dan apa bagian kue kekuasaan yang diperoleh. Hal tersebut tampak pada tingginya intensitas safari politik yang dilakukan oleh bakal kandidat dengan melakukan penjajakan hampir pada semua partai. Kedua, diakomodirnya sejumlah perwakilan partai ke dalam kabinet. Walaupun tak lagi ketua umum, tetapi hal ini juga merefleksikan pola kecenderungan ke arah model partai *match-all*. Dalam komposisi kabinet, terlihat tidak ada partai yang tidak diakomodir kepentingannya. Ketiga, tidak ada jaminan peta koalisi tidak berubah sepanjang pemerintahan terpilih berjalan. Selama terdapat kemungkinan-kemungkinan yang memberi keuntungan, dikotomi pendukung pemerintah dan oposisi akan bersifat cair karena selalu terdapat kompromi dan akomodasi dari semua partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Aminuddin, M. Faishal. 2011. "Partai dan Pemerintahan Efektif". *Koran Tempo*. Juli, 2.
- Azwar, Rully Chairul. 2009. *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era: dari Partai Hegemonik ke Partai yang Berorientasi Pasar*. Jakarta: Grasindo
- Baswedan, Anies Rasyid. 2004. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory". *Asian Survey*. Vol. 44, No. 5. 669-90.
- Dahl, Robert, Ian Shapiro and Jose Antonio Cheibub. 2003. *The Democracy Sourcebook*. Cambridge: The MIT Press.
- Detik.com. 2009. "Partai Demokrat Paling Banyak Dipilih". Januari, 04. <http://news.detik.com/read/2009/01/04/151802/1062778/10/>

partai-demokrat-paling-banyak-dipilih?nd771104bcj (diakses 4 Februari 2015).

- Diamond, Larry dan Richar Gunter. 2001. *Political Parties and Democracy*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
- Duverger, M. 1954. *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London, England: Methuen.
- Gunther, Richard dan Larry Diamond. 2001 “Types and Functions of Parties”, dalam *Political Parties and Democracy*, Larry Diamond dan Richard Gunter, *Political Parties and Democracy*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press 2001, 3-39.
- Gunther, Richard dan Larry Diamond. 2003. “Species of Political Parties: A New Typology”, *Party Politics* 9 (March). No.2: 167-199.
- Hamidi, Ahsan Jamet, et.al. 2008. *Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang: Laporan Pemantauan Dana Kampanye*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Indikator Politik Indonesia. 2013.”Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Uang: Survei Dapil Septeber – Oktober 2013 dan Survei Nasional Maret 2013”. Dirilis oleh Indikator Politik Indonesia di Jakarta. <http://www.indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan-Konpers-Rilis-Survei-Sikap-dan-Perilaku-Pemilih-terhadap-Money-Politics-> (12 Desember 2013).
- International Foundation for Election Systems. 2005. *Public Opinion Survey Indonesia 2005 Republic of Indonesia*. Jakarta: IFES.
- King, Dwight Y. 2003. *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*. Westport, CT and London: Praeger.
- Kitschelt, H. 1989. *The Logics of Party Formation*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kompas*. 2009. “Angket Century Bergulir di DPR, Partai Golkar dan PDI-P Mendukung”. November 12 November.
- Kompas*. 2011. “Demokrat Cabut Usulan Hak Angket”. 27 Januari.
- Kompas*. 2011. “Hak Angket Mafia Pajak, Sejumlah Partai Anggota Setgab Memberi Dukungan”. 25 Januari.

- Kompas*. 2011. "Koalisi Akan Dievaluasi: Usulan Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak Ditolak". 23 Februari.
- Laakso, Markku and Rein Taagapera. 1979. "Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe," *Comparative Political Studies* 12 (April), No.1: 3-27.
- Lembaga Survei Indonesia. 2009. "Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR Pilihan Masyarakat". Rilis survei oleh LSI. <http://www.lsi.or.id/riset/371/Rilis-Survei-Kinerja-DPR-RI> (17 September 2009).
- Lembaga Survei Indonesia. 2009. "Rasionalitas Pemilih: Kontestasi Partai Menjelang Pemilu 2009". Rilis survey oleh LSI. <http://www.lsi.or.id/riset/355/rasionalitas-pemilih> (Januari 2009).
- Lembaga Survei Indonesia. 2011. "Kepercayaan Publik pada Pemberantasan Korupsi". Rilis survei oleh LSI. http://www.lsi.or.id/riset/409/Rilis_LSI_Korupsi (8 Januari 2012).
- Litbang Kompas. 2008. "Pemilih Kian Abaikan Janji-janji Parpol". *Kompas*. 09 September.
- Litbang Kompas. 2009. "Berharap pada Koalisi Partai 'Berwarna'". *Kompas*. 12 Januari.
- Litbang Kompas. 2010. "Saatnya Titik Balik Partai Politik". *Kompas*. 31 Mei.
- Litbang Kompas. 2013. "Jalan Terjal Parpol Menuju Pemilu". *Kompas*. 04 Maret.
- Mainwaring, Scott. 2003. "Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination" dalam Robert Dahl, Ian Shapiro dan Jose Antonio Cheibub. *The Democracy Sourcebook*, Cambridge: The MIT Press 2003, 266-271.
- Mietzner, Marcus. 2009. *Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynastic and the Consolidation of Party System*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.
- Qodari, M. 2008. "Kiprah dan Nasib Partai-Partai Baru di Pemilu 2009". *Seputar Indonesia*. Juli, 20.

- Ratnawati, Tri dan Syamsuddin Haris. 2008. "Political Parties in Indonesia from the 1950's to 2004: An Overview". *CRISE Working Paper* 61 (Desember).
- Reilly, Benjamin. 2001. *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sherlock, Stephen. 2009. "Indonesia's 2009 Election: The New Electoral System and the Competing Parties" dalam CDI Policy Papers on Political Governance. Tersedia pada http://archives.cup.anu.edu.au/cdi_anu_edu_au/IND/2008-09/D_P/2009_03_RES_PPS6_INDON_Sherlock/2009_04_PPS6_INDON_Sherlock.pdf (diakses pada 12 Januari 2015)
- Shugart, Matthew Soberg and John M. Carey. 1992. *Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tan, Paige Johnson. 2004. *Party Rooting, Political Operators and Instability in Indonesia: A Consideration of Party System Institutionalization in a Communally Charged Society*, paper dipresentasikan pada the Southern Political Science Association, New Orleans, LA (10 Januari 2004).
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tomsa, Dirk. 2013. "What Type of Party? Southeast Asian Parties between Clientelism and Electoralism" dalam *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism dan Electoral Competition*. Eds. Dirk Tomsa and Andreas Ufen.. New York: Routledge.
- Ufen, Andreas. 2006. "Political Parties in Post-Soeharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisasi'". *GIGA Working Paper* No. 37. Hamburg: German Institute of Global and Area Studies. Tersedia pada http://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp37_ufen.pdf (diakses pada 11 Januari, 2015).
- Wagner, Steve. 1999. *Summary of Public Opinion Preceding the Parliamentary Election in Indonesia: 1999*, Steven Wagner. Washington DC: International Foundation for Election Systems.

Wolinetz, S. 2002. “*Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization*”, dalam *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, Eds. R. Gunther, J. R. Montero, dan L. Juan. Oxford: Oxford University Press, 136-165.